



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR 927/I/X/2016

**Tanggap Darurat Banjir Bandang Garut
Harus Cepat Dilakukan**

**KPK Gagal Bedakan Antara
Wilayah Hukum dan Etik**

**13 Isu RUU Pemilu
Masih Krusial**



Tanggap Darurat Banjir Bandang Garut Harus Cepat Dilakukan

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis meminta penanganan tanggap darurat atas musibah banjir bandang di Garut, baik itu oleh mitra kerja pemerintah dan pemda, harus cepat dilakukan, pasalnya hujan diprediksi akan turun lagi dan dikhawatirkan banjir akan kembali terjadi.

Hal tersebut diungkapkan Fary saat Tim Kunjungan Komisi V DPR RI meninjau Rusunawa tempat penampungan sementara korban banjir bandang di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Selasa (27/9). Sebelumnya Komisi V DPR RI pun berkesempatan melihat bantaran sungai Cimanuk yang mengalami kerusakan parah akibat banjir bandang.

"Kita melihat langsung bagaimana upaya dari mitra kerja kita, Basarnas, dan Pemda dalam melakukan kegiatan tanggap darurat. Saya kira ini langkah pertama untuk itu kita meminta terus didorong agar penanganan tanggap

darurat cepat dilakukan karena hujan akan turun lagi, kita tidak menginginkan terjadi banjir yang kedua. Dan langkah itupun sudah dilakukan dengan memasang beronjong-beronjong di beberapa bantaran yang jebol," ujar Fary.

Lebih lanjut Fary mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya pun menanyakan kepada Pemda terkait hal apa yang menjadi prioritas yang perlu di dukung DPR RI.

"Mereka (Pemkab Garut-red) menjelaskan saat ini sudah dibangun bronjongan untuk mengantisipasi apabila terjadi hujan lagi, namun untuk pengalokasian pemukiman pasca bencana, masih dalam proses. Untuk itu kami meminta Kementerian PU untuk mendata bantaran kali yang sudah jebol untuk segera diatasi, dan mencari lahan untuk relokasi masyarakat korban banjir," tegas Fary.

Terkait tempat penampungan korban bencana banjir di Rusunawa, politisi dari Partai Gerindra ini menjelaskan, bahwa Komisi V DPR RI melihat fasilitas cukup baik seperti ketersediaan air dan listrik. "Kemudian saya juga menanyakan apa masih ada kebutuhan mayoritas berkaitan Rusunawa yang perlu untuk kita (DPR RI-red) dukung," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman saat mendampingi Komisi V DPR RI menjelaskan, pentingnya ketersediaan Rusunawa. "Untuk itu kita minta disiapkan lahannya



Komisi V DPR RI saat meninjau tempat terjadinya bencana banjir di Garut, Jawa Barat

dan kita akan memberikan dukungan penuh, terutama pembangunan untuk relokasi korban banjir yang berada di bantaran kali, dan juga segera mengatasi kali-kali yang jebol. Saya kira itu poin yang kita sepakati untuk segera dilakukan," katanya.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan, dirinya turut berkabung atas kejadian tersebut dan mengapresiasi mitra kerja Komisi V yang bergerak cepat, baik itu Basarnas dalam melakukan pencarian para korban, kemudian, Kementerian PU dalam menyiapkan air

bersih bekerja sama dengan Pemda menyiapkan tampungannya melalui Rusunawa yang meski belum diserahkan oleh pemerintah pusat tetapi sudah bisa digunakan oleh para pengungsi.

"Kemudian kami melihat ada hal-hal untukantisipasi kedepannya, dalam jangka menengah dan panjang, tentunya kami akan sampaikan kepada pimpinan DPR RI bahwasanya kejadian ini ada hulunya, ada hilirnya," papar Yudi.

"Ini adalah bagian dari hilir, hulunya vegetasi di wilayah Papandayan, sungainya Cikurai itu sudah terjadi banyak alih fungsi hutan. Kemudian penggundulan, ini harus dengan tegas ditindak, dinormalkan vegetasinya. Jangka pendek memang harus ada antisipasi tanggul. Karena yang ada tidak memadai," lanjutnya.

Yudi pun menambahkan, berdasarkan pantauannya dilapangan, politisi PKS ini mengatakan ada objek vital strategis yang tersapu oleh air bah "Tempo hari tanggulnya masih utuh, ternyata tanggul yang ada kurang tinggi, efeknya adalah pemukiman penduduk juga habis yang dipinggir tanggul itu. Jadi kami mendorong tentunya pendekatan komprehensif oleh pemerintah baik itu dari sisi pendekatan hulu sampai hilir apalagi kabupaten Garut merupakan kabupaten nomor satu rawan bencana. Ini harus ada perhatian yang serius," harap Yudi. ■

DPR RI Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2016 dengan Catatan Perbaikan

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan beserta para Pimpinan Komisi I, V, VIII, IX, melakukan rapat konsultasi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta perwakilan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Luar Negeri, Perwakilan Panglima TNI dan Kapolri. Dalam rapat ini membicarakan tentang penyelenggaraan haji tahun 2016 yang sudah berlalu.

Ada beberapa soal yang dibicarakan antara *stakeholder* Pemerintah dan DPR RI, antara lain terkait penambahan kuota haji, keamanan bagi jamaah haji, transportasi, fasilitas, serta kesehatan jamaah haji dan lain sebagainya. Dalam keterangannya Ketua DPR RI yang kerap disapa Akom, mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan haji. Karena selama penyelenggaraan haji tidak ditemukan masalah yang serius berkaitan dengan pelayanan haji.

"Dewan sepakat memberikan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan instansi-instansi yang saya sebutkan, Kementerian Luar Negeri, Dubes Arab Saudi dan lain-lain. Selain tentu tidak ada masalah krusial, secara umum pelaksanaan pelayanannya berjalan dengan baik," papar Akom di ruang Rapat Pimpinan Nusantara III, Senin (26/9).

Meskipun DPR RI mengapresiasi pemerintah, namun juga tetap memberikan catatan, antara lain DPR RI dan pemerintah akan terus berupaya untuk menambah jumlah kuota jamaah haji. Salah satu upaya DPR RI dalam penambahan kuota, DPR RI akan melakukan muhibah ke Arab Saudi, menggunakan fungsi



Suasana saat konferensi pers usai rapat evaluasi haji 2016 dan penambahan kuota haji

diplomasi parlemen sebagai salah satu usahanya.

"Dalam rangka perbaikan di tahun depan agar menjadi lebih baik lagi, satu soal kuota. Kuota kita akan lakukan langkah, legislatif ataupun eksekutif. Eksekutif dalam hal ini Departemen Agama dan Kemenlu akan berupaya untuk menambah kuota haji kembali," ujar Akom.

Selain kuota, fasilitas permukiman untuk jamaah haji juga menjadi sorotan DPR RI, Akom menjelaskan, akan meminta kepada bank-bank yang menjadi tempat penyimpanan uang tabungan haji untuk berkontribusi dalam perbaikan fasilitas pemondokan jamaah.

"Kita sepakat soal pemondokan, terutama di Arafah yang tendanya kurang baik, kurang layak, kita mendapat

kesepakatan mengundang beberapa perbankan yang ditempati banknya oleh dana haji sejumlah Rp 84 triliun itu, diberikan *CSR*-nya, untuk perbaikan tenda di Arafah tersebut," jelasnya.

Berkaitan dengan kesehatan, transportasi dan keamanan bagi jamaah haji, juga menjadi perhatian DPR RI. "Kemudian soal kesehatan, akan ditambah nanti tenaga

kesehatan dokternya. Kemudian juga perhubungan dan keamanan bagi jamaah kita. TNI dan Polri kemungkinan akan ditambah," papar Akom.

Menanggapi sikap DPR RI tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berterimakasih, serta tetap berupaya meningkatkan pelayanan dan fasilitas haji yang akan datang.

"Kami sangat berterimakasih kepada DPR RI sebagai pengawas pelaksanaan ibadah haji yang telah memberikan apresiasi. Tentu meskipun demikian, Kementerian Agama tidak menutup mata, karena masih juga ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ada beberapa kelemahan-kelemahan yang tentunya pada tahun mendatang harus kita tingkatkan, seperti tenda-tenda di Arafah, di Mina," ungkapny. ■

(oto), foto: jakarta/hr.

BULETIN
PARLEMENTARIA



PENAWAS UMUM Pimpinan DPR RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH** Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI) **WAKIL KETUA PENGARAH** Dra. Damayanti, M.Si (DEPUTI PERSIDANGAN) **PIMPINAN PELAKSANA** Drs. Suratna, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen) **PIMPINAN REDAKSI** Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak) **WK. PIMPINAN REDAKSI** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Media Cetak), Ahyar Tibi, S.H (Kasubag Media Analisis), Insan Abdirrohman, S.H, M.Si (Kasubag MedSos dan Website) **REDAKTUR** Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos **SEKRETARIS REDAKSI** Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto **ANGGOTA REDAKSI** Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Sofyan Efendi, Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega **REDAKTUR FOTO** Eka Hindra, Iwan Armanias **FOTOGRAFER** Rizka Arianindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah, Andi M.Illham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana, Arief Rachman, R. Kresno PD Moempoeni, Azka Restu Fadilah **ADMINISTRASI FOTO** Hasri Mentari **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA** Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 3 JI. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com, www.dpr.go.id/berita

PIMPINAN PENERBITAN Djujawan Widjaya, S.Sos. M.AP (Kabag Penerbitan), **WK. PIMPINAN PENERBITAN** Mediantoro, SE (Kasubag Produksi), Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si (Kasubag Distribusi) **STAFF PRODUKSI** Eko Muriyanto, Barliansyah, Fathurahman, Mujiono, Farid, SE **SIRKULASI** Abdul Kahfi, S.Kom, Remon Ifan, Siti Rondiyah, Oji Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421 Email penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS) | ISI BERITA DAN MATERI FOTO DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN |

Ketua DPR RI Komitmen Perkuat BKD

Ketua DPR RI Ade Komarudin berkomitmen untuk memperkuat Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI, seperti penguatan pada fungsi DPR RI, yakni fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi parlemen.

Demikian dikatakan Akom, panggilan akrab Ade Komarudin, usai menerima Kepala BKD Johnson Rajagukguk beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

"Saya selaku Pimpinan DPR RI berkomitmen untuk memberikan penguatan terhadap kelembagaan BKD. Kita ingin dengan penguatan BKD ini, DPR RI semakin kuat, semakin maksimal kinerjanya. Untuk itu, BKD memerlukan SDM yang kuat," kata Akom.

Akom tak menampik, SDM memegang peranan penting untuk memperkuat BKD. Menurutnya, BKD harus diisi oleh para ahli di berbagai bidang, seperti hukum, anggaran, dan juga pengawasan di berbagai sektor, yang menjadi fungsi dari Komisi I hingga Komisi XI dan Alat

Kelengkapan Dewan lainnya.

Untuk itu, politisi F-PG itu mendukung BKD untuk merekrut SDM tambahan. Saat ini, BKD memiliki SDM



Ketua DPR RI Ade Komarudin berjabat tangan dengan jajaran Badan Keahlian Dewan

sebanyak 126 orang, dan kedepannya akan menambah SDM sebanyak 27 orang.

"Saya sedang melakukan satu inisiatif agar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan ruang untuk penguatan BKD

ini, dan Insya Allah dalam beberapa waktu ke depan, tahap pertama mungkin akan ditambah SDM sekitar 27 orang, kemudian selanjutnya secara

bertahap dilakukan rekrutmen," jelas Akom.

Untuk proses rekrutmen ini, politisi asal dapil Jawa Barat itu berpesan agar pola rekrutmen dilakukan secara transparan, terbuka, dan memenuhi asas atau norma *good clean and good governance*.

Sementara itu, Kepala BKD Johnson Rajagukguk menjelaskan selama ini pihaknya dalam merekrut SDM dilakukan secara profesional, dan memiliki kemampuan

dalam mengelola badan ini.

"Mulai Juli 2016, BKD menempatkan 3 tenaga fungsional analis APBN, untuk melakukan pendampingan saat pembahasan APBN," jelas Johnson. ■

(g) foto: jktu/br

DPR RI Dorong Ulos Sebagai Warisan Dunia

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan akan mendorong Ulos yang kini menjadi warisan budaya nasional menjadi warisan budaya internasional. Hal itu disampaikan usai menerima audiensi dengan Panitia Hari Ulos di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Rabu, (28/9).

“Jadi memang Ulos saat ini menjadi warisan budaya nasional dan ingin ditingkatkan menjadi warisan budaya dunia. Tentunya yang berhak dan mendeklarasikan adalah UNESCO. Jadi tata caranya harus mmenuju ke arah sana,” ujar Agus.

"Diantaranya yakni dilaksanakan pameran, pendidikan dan juga harus disampaikan sejarah Ulos kepada UNESCO. Mudah-mudahan bisa diterima sebagai warisan budaya dunia," sambungnya.



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

Politisi Demokrat ini pun juga diundang oleh Panitia Hari Ulos yang akan berlangsung di Medan pada 17 Oktober 2016 nanti. Ia pun akan mengupayakan untuk memenuhi undangan tersebut. "Tadi mereka hadir karena ingin melaksanakan pameran Ulos di Medan dan secara khusus ingin mengundang saya tanggal 17 Oktober, akan ada pameran Ulos disana. Saya tentunya akan melihat jadwal saya, barangkali nanti jadwalnya tidak berbenturan maka saya akan beri jawaban," terangnya.

Agus pun menegaskan akan terus

berupaya meningkatkan warisan budaya agar tidak ada negara lain yang mengklaim budaya Indonesia. Ia pun akan mendorong Ditjen Kebudayaan untuk memberikan dukungan terhadap persoalan ini. "Memang warisan budaya harus kita tingkatkan terus, kita pelihara dan deklarasikan sebagai warisan budaya dunia sehingga tidak ada yang bisa komplain bahwa Ulos ini produksi budaya negeri lain," ujar Agus.

"Ini adalah pentingnya deklarasi terhadap warisan budaya. Ini memang berkaitan dengan Ditjen kebudayaan yang

harus betul-betul mendorong masalah ini," sambungnya.

Mengenai tindak lanjut dari upaya DPR RI ini, Agus akan berkoordinasi dengan Komisi X untuk memberikan dukungan politik supaya Ulos menjadi warisan budaya dunia. "Nanti saya akan telpon Ketua Komisi X, akan saya sampaikan bahwa hal seperti ini yang harus di dorong. Karena secara politik DPR RI akan terus berikan dukungan agar Ulos sebagai warisan budaya dunia. Dan persyaratan lain DPR RI akan berkonsultasi dengan Kementerian terkait agar terpenuhi," pungkas Agus. ■

(b.s.mpl), foto: jayanti/br

Fahri Hamzah Tetapkan Pimpinan MKD

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan pergantian Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pergantian ini atas usulan dari Fraksi Golongan Karya, posisi yang diganti berasal dari anggota fraksi yang sama, Lili Asjudiredja yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua MKD digantikan oleh Adies Kadir. Pergantian posisi ini telah disepakati oleh semua fraksi yang menjadi wakil anggota MKD.

“Tugas pimpinan itu kan memfasilitasi kegiatan administratif, kita hanya melaksanakan apa yang terjadi. Keputusan yang disepakati anggota secara kolektif kolegial. Dan ini karena ada usulan perubahan dan disepakati oleh semua partai, maka kami sebagai pimpinan dewan hanya memfasilitasi,” jelas Fahri, di Ruang MKD, Nusantara I, DPR RI, Jakarta, Selasa (27/9).

Ke depan, Fahri berharap MKD bisa menjalankan fungsinya secara profesional, independen, serta menjadi Alat Kelengkapan Dewan yang menjaga kehormatan lembaga DPR RI. "Menjadi lembaga yang menjaga kehormatan. Kita



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menetapkan pergantian Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)

berharap ini bisa dilakoni menjadi lebih baik," harapnya.

Fahri juga menjelaskan bahwa rezim sidang di MKD adalah rezim peradilan etik. Sedangkan ranah etika dan yuridis tentu harus dipisahkan. Menurutnya tidak semua masalah harus diselesaikan di ranah peradilan hukum, bisa juga diselesaikan

dalam peradilan etik.

"Bahwa gak perlu semua masalah itu diselesaikan di ranah hukum, bisa diselesaikan di ranah etik," papar Fahri.

Fahri juga mengatakan rezim etika dan kehormatan umumnya tertutup. Dia beralasan, karena peradilan etika berkaitan dengan permasalahan yang personal, hal tersebut demi menjaga privasi

yang bersangkutan.

"Rezim etika dan kehormatan itu umumnya dia tertutup. Dan sifat dari tertutup itu karena terkait dengan prinsip-prinsip dalam hukum dan etika praduga tak bersalah. Dan itu kadang-kadang lebih banyak soal pribadi, privat sifatnya," ungkap Fahri. ■

(eko), foto: rizka/br

KPK Gagal Bedakan Antara Wilayah Hukum dan Etik

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan penegasan yang cukup keras kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menekankan dalam institusi penegak hukum seperti KPK harus ada kepandaian menilai mana yang disebut etika dan mana yang disebut dengan pelanggaran hukum.



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Etika adalah apa yang baik dan apa yang buruk, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban moral. Namun kesalahan etik tidak sama dengan pelanggaran hukum. Sedangkan hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

"KPK itu gagal membedakan wilayah etik dan wilayah hukum. Menganggap semua masalah etik adalah masalah hukum. Jadi OTT itu mendorong KPK untuk mengadili etika. Percakapan orang itu etika, itu bukan peristiwa hukum," tegasnya menjelaskan di ruang MKD Nusantara I, Selasa (27/9).

Menurutnya persoalan etika tidak menjadi penekanan dalam pemberantasan korupsi. Baginya pemberantasan korupsi harus fokus pada tindakan yang berakibat merugikan negara. Sedangkan masalah etika belum bisa dikategorikan pada pelanggaran hukum. Ganjaran dalam pelanggaran etika ada tempatnya sendiri, tidak bisa dicampuradukkan

dengan tempat peradilan hukum.

"Kalau negara mau mengadili semua hal, rusak kita. Itu kerjanya Tuhan, gak perlu diambil manusia. Makanya kita berhenti pada peristiwa hukum. Dan korupsi itu artinya kerugian negara, kejar aja kerugian negara," serunya.

mengatakan, dalam institusi KPK seharusnya ada unsur pimpinan yang memiliki kecakapan dalam berpikir. **D i a m e n g a t a k a n** memberantas korupsi itu tidak bisa pakai otot tapi pakai otak.

"Kalau pakai otot terus-an, anda kalah pinter dari koruptor. Koruptor itu bekerjanya dengan otak. Karena itulah kita butuh orang pinter di KPK," ujarnya.

Dia memaparkan, jangan sampai seorang pejabat negara hanya karena menerima tamu, tanpa disadari tamunya ternyata memendam niat buruk. Maka kesalahan tidak bisa dibebankan kepada yang menerima tamu, karena pejabat negara tidak bisa menutup diri dari masyarakat yang bertamu.

"Jangan kemudian orang terima uang yang merupakan persoalan etik lalu dianggap sebagai kerugian negara. Rugi dari mana negara gak rugi apa-apa kok. Ini yang missed, makanya saya dari dulu mengusulkan KPK itu butuh pemikir, KPK itu perlu pemikir bukan perlu

tukang tangkap dan ahli sadap," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam dunia ini tidak semua persoalan bisa diadili. Makanya ada dunia setelah dunia, atau hari kemudian, Islam menyebutnya akhirat. Di akhirat kesalahan yang tidak bisa diadili di dunia akan diadili oleh Yang Maha Adil.

"Kaya kasus Irman Gusman itu kan orang membawa sesuatu sebagai peristiwa etik sebenarnya, kalau dia tidak melapor ke KPK. Tapi kan dia punya waktu 30 hari untuk melapor. Namun begitu orang ditangkap dan namanya disebut koruptor, rusak lah dia, padahal itu wilayah etik. Dan Irman tidak melakukan keputusan apapun sesuai dengan kewenangan dia. Tidak ada kewenangannya Irman untuk mengizinkan impor gula, atau membebaskan tersangka tidak ada. Makanya disebutnya ranahnya etik," jabarnya dengan gamblang. ■

(foto), foto : rizka/bir

Fadli Zon Kunjungi Warga Pasar Ikan

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi warga Kampung Aquarium, di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Fadli ingin melihat dari dekat nasib warga yang masih bertahan di kawasan tersebut, akibat penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Fadli sempat berdialog dengan warga setempat pada Jumat (23/9) lalu, dan memberi semangat hidup sekaligus memberi bantuan logistik. Mereka masih bertahan di lokasi tersebut, lantaran rusun Rawa Bebek yang disediakan Pemprov DKI terlalu jauh dari tempat kerjanya.

Aditya Mufti Arifin Dilantik Jadi Wakil Ketua Pansus RUU Merek

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandu pengesahan penggantian Wakil Ketua Pansus RUU Merek dari FPP di Ruang Rapat Pansus B Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (27/9). Dalam Rapat Pansus RUU Merek yang juga dihadiri Ketuanya Desy Ratnasari didampingi Pimpinan dan sejumlah anggota Pansus, anggota FPP Aditya Mufti Arifin ditetapkan sebagai Wakil Ketua Pansus RUU Merek menggantikan Iskandar D. Syaichu.

Dalam acara yang berlangsung singkat tersebut, se usai pengesahan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyerahkan palu pimpinan dilanjutkan foto bersama Pimpinan Pansus RUU Merek.

Usai pengesahan sebagai Wakil Ketua Pansus Aditya Mufti Arifin mengatakan, pembahasan RUU Merek sudah mendekati finalisasi tinggal sinkronisasi. Pansus akan melanjutkan sinkronisasi pada bulan Oktober dan diharapkan secepatnya bisa diselesaikan.

"Insya Allah pada bulan Oktober bisa selesai, tinggal sinkronisasi dan masalah-



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memandu pengesahan penggantian Wakil Ketua Pansus RUU Merek

masalah yang krusial seperti Protokol Madrid apakah akan diratifikasi atau tidak. Secara garis besar sudah hampir rampung," jelasnya.

Dengan disahkannya RUU Merek nanti, dia berharap segala masalah hukum bisa terselesaikan, sebab ada beberapa kasus berkaitan merek seperti Ikea dan Pierre Cardin. Diharapkan lahirnya UU Merek akan memberikan jaminan kepada investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk investasi di Indonesia. Termasuk sebagai kesiapan memasuki pasar bebas MEA dan globalisasi, dalam era ini perlu UU yang melindungi Merek dan Paten.

Sependapat dengan Mufti Arifin, Ketua Pansus Desy Ratnasari optimis RUU ini bisa diselesaikan pada bulan Oktober bisa memasuki pembahasan Tingkat II sebab sudah masuk Tim Sinkronisasi. "Kalaupun bulan Oktober belum selesai maka tahun ini Nopember atau Desember sudah bisa disahkan" kata Desy menambahkan. ■

(mp) / foto: aza/br



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengunjungi warga Kampung Aquarium, di kawasan Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara

Kawasan tersebut, kini sudah rata dengan tanah. Dan mereka yang tetap bertahan di sana, membangun gubuk-gubuk kecil dan tenda untuk sekadar bisa bertahan

hidup. "Kami sudah melihat langsung warga di sini. Mereka berhak mendapatkan hunian yang layak. Banyak yang lahir dan kerja di sini. Untuk itu, pemerintah perlu negosiasi ulang yang lebih adil dengan warga di sini," ucap Fadli kepada pers, seraya menambahkan, "Kami bersimpati atas perjuangan warga Kampung Aquarium ini."

Menurut Fadli, apa yang dilakukan

Gubernur DKI dengan mengusir para nelayan di Kampung Aquarium ini, merupakan tindakan sewenang-wenang dan biadab. Dan pengusuran tersebut tidak didahulukan dengan dialog dan negosiasi. "Kebiasaan ini pasti akan menimbulkan perlawanan," seru Fadli lagi.

Suyoto, warga setempat yang ditemui Parlemen menuturkan, ada sekitar 700 kk dari empat RT yang tergusur. Mayoritas berkerja sebagai nelayan dan pedagang. Dan yang tetap bertahan sekitar 100 KK. Mereka tinggal tepat di bibir pantai dan banyak perahu nelayan yang bersandar. Dikatakan Fadli, zaman ORBA saja tidak ada pengusuran seperti ini. Dan kelak bila ada gubernur baru, harus membuka kembali dialog. ■

(mb) / foto: jaba/br

Legislator Soroti Kendala Sertifikasi Tanah

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri menyoroti beberapa kendala yang dihadapi masyarakat ketika mengurus sertifikasi tanah di Badan Pertanahan Nasional. Kendala tersebut tetap terjadi meskipun Kementerian Agraria sudah menyampaikan paparan tentang visi misi yang bagus, tetapi yang menjadi problem adalah aparat yang ada di bawah.

Hal itu diungkapkan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang pada Selasa, (27/9) di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. "Memang ini jadi kendala selama ini. Masyarakat itu punya animo yang sangat besar untuk mensertifikasikan tanahnya. Akan tetapi, di bawah banyak terkendala oleh kondisi aparat di bawah," ujarnya.

Politisi Nasdem ini mencontohkan untuk memecah sertifikat saja memakan waktu delapan bulan, dan itu sangat lama sekali, terlebih harganya pun juga cukup mahal.



Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri

"Andaikan pemecahan sertifikat saja bisa memakan waktu delapan bulanan, dan harganya sangat tinggi. Maaf teori yang dilakukan ATR itu luar biasa, tapi sampai di bawah ini sulit terbentuk," paparnya.

Apalagi berdasarkan laporan ketika melakukan kunjungan kerja, Tamanuri sering menerima laporan akan tingginya biaya sertifikasi. "Apalagi, laporan dari kawan-kawan ketika saya kunjungan itu memerlukan dana yang besar. Pemisahan sertifikat tanah saja sampai delapan juta, ini

mungkin yang bapak akan hadapi di masa yang akan datang," terangnya.

Terkait Prona misalnya, menurut Tamanuri seharusnya itu gratis, tetapi dalam banyak kasus itu memakan dana. "Prona saja yang gratis, itu banyak dananya, bisa 1-2 juta," ujarnya.

"Sebetulnya kalau kita mau bantu masyarakat, ya yang namanya pronas itu ya kita subsidi uangnya supaya masyarakat bergairah membuat sertifikat," sambungnya.

Tamanuri pun menegaskan bahwa tugas Kementerian Agraria semakin berat, karena jumlah penduduk semakin bertambah dan tanah yang jumlahnya tetap. Ia pun menyarankan agar dilakukan evaluasi terhadap BPN di daerah.

"Semakin hari tugas Kementerian Agraria bukan semakin enteng, karena penduduk kita selalu bertambah dan luas tanah tetap. Kuburan aja sudah luar biasa. Oleh karena itu, kita evaluasi kembali kawan kita di bawah," pungkasnya. ■

(hs.mp) foto: jayadi/bn

Komisi V Tinjau Pembuatan Saluran Air Baku PDAM Cilacap

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke tempat pengolahan air bersih PDAM, guna meninjau pembuatan saluran air baku di Bendung Gerak Sungai Serayu Kecamatan Kesugihan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (22/6).

“Kehadiran Komisi V untuk melihat bagaimana PDAM ini mensuplai air baku bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Cilacap,” ungkap Wakil Ketua Komisi V Michael Wattimena disela-sela kunjungannya.

Anggota Komisi V Novita Wijayanti (F-Gerindra) mengatakan banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah setempat terkait pembuatan saluran air baku PDAM, antara lain, ketersediaan air baku diambil dari saluran irigasi bendung



Komisi V DPR RI kunjungan kerja ke tempat pengolahan air bersih PDAM di Cilacap, Jawa Tengah

Serayu yang pada bulan-bulan tertentu terkendala dengan adanya pemeliharaan saluran air dikeringkan antara 1-2 bulan setiap tahunnya.

Kapasitas tandon air baku di instalasi pengolahan air

Baleg Imbau Pemerintah Tunda Program Studi Dokter Layanan Primer

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengimbau Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi bersama Kementerian Kesehatan untuk menunda program studi Dokter Layanan Primer (DLP). Imbauan ini berdasarkan penolakan masif dari beberapa *stakeholder* yang menilai program pemerintah tersebut tidak berbasis bukti dan tidak efisien.

“ Kami hanya bisa menghimbau khususnya kepada Kementerian Kesehatan, walaupun melaksanakan program sesuai dengan undang-undang, tetapi sebaiknya jangan tergesa-gesa, DLP ditahan dulu” ungkap Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Kemenristekdikti, Kemenkes beserta ke-34 Ketua Wilayah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Politisi dari F-PAN itu berpandangan Pemerintah sudah seharusnya mengkaji ulang program DLP yang tertuang dalam UU Pendidikan Kedokteran (Dikdok). "Dari seluruh informasi yang kita tangkap disini, saya belum mendengar satupun yang setuju dilaksanakannya DLP. Kalau itu yang terjadi, tidak perlu dianalisa terlalu jauh,



Wakil Ketua Baleg Totok Daryanto

artinya ada masalah di UU itu," tegas Totok.

Sebagaimana diketahui, Program studi Dokter Layanan Primer merupakan pendidikan kedokteran lanjutan dari program profesi dokter yang setara dengan jenjang spesialis sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun

PDAM Cilacap mempunyai daya tampung 6.000 meter kubik, sedangkan pemakaian air bersih per harinya mencapai sekitar 32.371 meter kubik sehingga kesulitan untuk menampung air.

"Kalau kemarau susah air, kalau hujan bencana. Apalagi di sini ada laut, pesisir pantai yang air bersihnya susah dicari," tandas politisi dari dapil Jawa Tengah VIII itu.

Ke depan, diharapkan PDAM yang melayani 8 wilayah di Kabupaten Cilacap tersebut, mempunyai sumber pengambilan air khusus untuk air minum berlokasi di hulu Bendung Gerak Serayu, sehingga kebutuhan air minum masyarakat Cilacap tidak terganggu, pada saat pengeringan saluran Irigasi Bendung Gerak Serayu.

Sementara itu, Direktur Irigasi dan Rawa Kementerian PUPR, Adang Saf

Ahmad mengatakan program pembuatan saluran air baku PDAM Cilacap dari Bendung Gerak Sungai Serayu ke tempat pengolahan air bersih terus dikordinasikan dengan Pemda setempat. "Secara teknis telah siap mengerjakan program tersebut, tinggal menunggu penganggarannya saja," ujar Adang.

Sebelumnya, Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI juga mendorong normalisasi alur Sungai Yasa. Normalisasi tersebut perlu dilakukan untuk mengatasi pendangkalan akibat sedimentasi lumpur dan pasir.

"Ini sudah lama sekali terjadi pendangkalan, sangat diperlukan pengerukan sehingga sedimentasi bisa diangkat dan para nelayan yang jumlahnya ada 17.000 ribu bisa mencari nafkah kembali," harap Novita. ■

2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok).

Kepada Baleg, pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengatakan dokter layanan primer menyebabkan beberapa kontroversi. Setidaknya ada beberapa alasan utama IDI menolak program pemerintah tersebut.

DLP dinilai akan memberatkan calon dokter, disamping biaya pendidikan kedokteran yang relatif mahal, DLP hanya akan menambah jalan panjang pendidikan dokter selama 3 tahun lagi. Padahal, untuk bisa berpraktik mandiri dengan Surat Tanda Registrasi (STR) definitif sebagai dokter diperlukan waktu minimum 8 tahun.

"Selain termahal, pendidikan dokter adalah pendidikan terpanjang di Indonesia, membutuhkan paling kurang 8 tahun untuk lulus, kalau orang itu cerdas dan bernasib baik. Dari antara 100 calon dokter, yang bisa tembus 8 tahun hanya 1 sampai 2 orang," ungkap Abdul Razak Thaha Ketua Dewan Pakar PB-IDI.

Selain itu, lanjut Abdul Razak, UU Dikdok berpotensi menyebabkan konflik horizontal antara DLP dan Non-DLP pada ranah pelayanan primer. Sebab, tidak ada perbedaan signifikan antara kompetensi Dokter Layanan Primer (DLP) dengan kompetensi pendidikan dokter yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI).

Untuk itu, IDI mengusulkan dilakukan revisi atas UU Dikdok dan meminta kepada Pemerintah agar menghentikan pembahasan substansi DLP dan berbagai kegiatan termasuk rekrutmen terkait persiapan program studi DLP.

Menanggapi hal tersebut, Totok mengatakan Baleg mendalami permasalahan tersebut dan akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) pemantauan dan peninjauan UU Dikdok. "Jika suatu UU mendapatkan penolakan yang cukup beralasan, maka kita akan melakukan perubahan-perubahan. Apalagi melihat penolakan dari organisasi-organisasi yang menaungi dokter begitu besar," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Legislasi juga menerima Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) yang menyerukan hal yang sama. ■

PIA DPR RI Kunjungi dan Beri Bantuan Korban Banjir Garut

Ketua Persaudaraan Isteri Anggota (PIA) DPR RI, Nety M. Ade Komaruddin prihatin dan turut berbelasungkawa atas musibah banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Garut beberapa hari lalu.

“ Saya dan seluruh anggota PIA DPR RI Prihatin dan turut berbelasungkawa atas musibah banjir bandang d kabupaten Garut Jawa barat. Sebagai wujud solidaritas kami terhadap para korban, PIA hadir, meninjau dan memberikan sedikit bantuan berupa pakaian, makanan dan alat mandi, alat sholat dan perlengkapan sekolah. Saya berharap agar bantuan ala kadarnya ini dapat bermanfaat untuk para korban,” ungkap Nety saat meninjau korban banjir bandang di



PIA DPR RI saat mengunjungi Garut yang terkena bencana banjir bandang

Sindang Reret Kecamatan Terogong Kidul, Garut, Senin (26/9).

Ditambahkan Panitia Acara Bakti Sosial PIA DPR RI, Fenty Donny Oekon,

korban merupakan warga yang tinggal di bantaran sungai Cimanuk yang notabene kerap terkena banjir. Oleh karena itu ia berharap agar Pemerintah kabupaten Garut dapat memberikan tempat yang layak bagi warga sekitar bantaran sungai Cimanuk.

Meski tidak mudah merelokasi warga yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat tersebut, namun dengan pendekatan yang baik Nety, Fenty dan seluruh anggota PIA DPR RI yakin warga akan bersedia pindah ke lokasi yang lebih aman dan layak. ■

(Ayu) foto: Rizka/Pr.

Korban Lumpur Sidoarjo Kembali Adukan Nasibnya

Korban lumpur Sidoarjo, khususnya para pengusaha UKM, kembali mengadukan nasibnya ke DPR RI. Para pengusaha tersebut mengaku belum sama sekali menerima ganti rugi atas lahan dan bangunan usahanya yang tenggelam oleh semburan lumpur. Padahal, sudah ada keputusan MK No.83/PUU-XI/2013 yang mengharuskan negara menjamin pelunasan ganti kerugian.

“ Amar putusan MK itu menegaskan, masyarakat yang tinggal di Peta Area Terdampak (PAT), negara harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugiannya. MK kemudian kembali menegaskan dalam putusannya No.63/PUU-XIII/2015 pada poin 3.9.3 bahwa ganti kerugian harus diberikan kepada perseorangan maupun badan hukum privat.

Demikian terungkap dalam perbincangan para pengusaha UKM korban lumpur Sidoarjo saat diterima Anggota DPR RI Sungkono, Senin (26/9), di ruang kerjanya. Mereka mengeluhkan pemerintah yang hingga kini lalai mengganti kerugian

materi para pengusaha. Sungkono sendiri sebelum menjadi Anggota Dewan, pernah mengajukan uji materi atas UU APBN pada tahun 2013 bersama tiga rekan pengusaha lainnya ke MK dan sudah dimenangkan.

Ironisnya, pemerintah seperti tak menggubris putusan MK tersebut. Mursid Mudiantoro, pengacara para pengusaha ini,



Anggota DPR RI Sungkono saat menerima para Pengusaha UKM lumpur Sidoarjo

menjelaskan, pemerintah lepas tangan atas kerugian para pengusaha, karena menganggap itu adalah persoalan B to B (business to business), dalam hal ini antara pengusaha UKM dengan PT. Lapindo Brantas (Grup Bakri). Inilah yang disesalkan dari sikap pemerintah oleh para pengusaha. Setidaknya ada 30 pengusaha yang masih terus berjuang mendapatkan hak ganti ruginya.

Pemerintah sendiri, kata Mursid, hanya mengganti kerugian rumah warga yang terdampak lumpur, tapi tidak untuk para

pengusaha. Pihaknya, mengaku sudah banyak mengadu ke pemerintah maupun parlemen. Sungkono anggota Fraksi PAN yang usahanya juga ikut ludes ditelan lumpur, terus berjuang dari dalam parlemen agar dana pengganti kerugian bagi para pengusaha UKM bisa dialokasikan dalam APBN.

Sungkono, politisi dari dapil Jatim I (Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo) ini, mengungkapkan, luas lahan para pengusaha itu sekitar 200 hektar dengan nilai ganti rugi yang harus dibayar

pemerintah sekitar Rp 700 miliar. Hingga saat ini, ia sendiri belum mendapat ganti rugi. Padahal aset perusahaannya cukup besar. Banyak pengusaha itu yang kemudian jatuh miskin, sakit-sakitan, dan sebagian meninggal dunia.

"Untung saya kerja di DPR RI. Kalau saya tidak DPR RI, mungkin nasibnya sama seperti mereka. Saya berani memperjuangkan ini semua, karena saya tidak mementingkan diri saya pribadi. Saya dapat amanat besar dari rakyat," ujar Sungkono. ■

(mb)/fotocore/ftr

Perlu Inovasi Terhadap Hasil Olahan Timah

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Provinsi Bangka Belitung khususnya timah, membuat Bangka Belitung harus tetap berinovasi untuk meningkatkan hasil seni olahan timah.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Hutomo saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, Kamis (22/96). Rombongan dipimpin oleh Nasril Bahar dan dihadiri oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Ihsan Yunus, Eriko Sotarduga, Endang Srikarti Handayani, Zulfan Lindan, Andriyanto Johan Syah, Darmadi Duriyanto, Kholilurrahman, Mukhlisin, dan Martri Agoeng. Kunjungan terkait Industri Kecil dan Menengah (IKM) Binaan Kementerian Perindustrian Dan Dalam rangka Menyerap Aspirasi Daerah.

Sartono menjelaskan, dibutuhkan inovasi-inovasi baru terhadap hasil seni olahan timah, dan untuk mencapai hal tersebut diperlukan koordinasi yang bersinergi antar mitra Komisi VI diantaranya perbankan dan BUMN, mengingat potensi hasil olahan timah

dapat dijadikan souvenir bagi para wisatawan yang mengunjungi Bangka Belitung.

"Jadi harus dirangkai menjadi suatu kesatuan, yang itu akan meningkatkan

utama adalah akses modal. Sartono mengatakan terkait akses modal Komisi VI Akan mensinergikan dan mengharmonisasikan dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Dan ia berharap, setelah dilakukan sinergi dan harmonisasi dapat lebih cepat mengembangkan sektor produk hasil olahan timah tersebut.

"Ya kita harus akui didalam sektor mikro kecil atau industri kecil ini permasalahan biasanya akses dana dan juga teknologi. Untuk itu karena didalam mitra kerja kita kan ada Kemperin, Perdagangan dan BUMN dan Menkop-UKM nanti hasil daripada kunjungan spesifik ini akan kita sampaikan masukan masukan yang di lapangan untuk dapat meningkatkan atau berkontribusi di dalam menaikkan atau mengangkat sektor industri kecil, kuliner dan produk-produk dari hasil Timah tadi. Itu nanti yang akan kita sampaikan di dalam rapat kerja dengan Kementerian terkait," tambahnya. ■



Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Provinsi Bangka Belitung

atau mengangkat daripada sektor mikro kecil ini yang berbahan utama Timah ini. Dan ini potensinya luar biasa, terang Sartono politisi dari fraksi Partai Demokrat.

Dari hasil Kunker Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung terkait IKM binaan Kementerian Perindustrian didapatkan persoalan

(mad), foto : Nadya/br.

Komisi X Harapkan Malang Bisa Kembangkan Destinasi Wisata Unggulan

Pimpinan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (kunspek) Komisi X DPR RI ke Malang, Jawa Timur, Ridwan Hisjam menginginkan Malang menjadi destinasi wisata unggulan. Dengan peningkatan status itu maka diharapkan bisa meningkatkan devisa dan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar Kabupaten Malang.

Hal itu diungkapkan-nya saat pertemuan dengan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (23/9). Seperti yang diketahui, lanjut Ridwan, Malang mempunyai banyak tempat wisata seperti Gunung Bromo, Air Terjun Banyu Anjlok, Alun-Alun Malang, Wisata Paralayang dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya tempat wisata alam di kota tersebut diharapkan dapat menjadi potensi kekuatan pariwisata. Selain

keindahan alam, Kabupaten Malang juga memiliki budaya daerah yang sangat kental sekali dan bisa dijual ke wisatawan.

"Kita menginginkan bahwa Kabupaten Malang bisa mengembangkan 10 destinasi baru oleh pemerintah, salah satunya Gunung Bromo. Gunung Bromo ini salah



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Malang, Jawa Timur

satu pintu masuknya dari Kabupaten Malang yang diharapkan menjadi destinasi unggulan sehingga mesti dikembangkan oleh pemerintah," ujar Anggota Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain itu Ridwan juga berharap adanya kerja sama antar pemerintah, "Kami

berharap adanya peran kerja sama G to G untuk bisa mengembangkan destinasi wisata Kabupaten Malang tersebut," terangnya.

Lebih lanjut Ridwan juga menyebutkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu tempat wisata, "Percuma kita kembangkan destinasi baru tapi SDM tidak ada, nantinya pengunjung bisa kecewa karena tidak adanya SDM yang bersertifikasi di bidang

pariwisata," jelas politisi asal Dapil Jawa Timur V termasuk Malang Raya dengan berharap, suatu saat nanti pariwisata menjadi pemasukan devisa nomor satu, karena saat ini pariwisata masih berada di urutan nomor 4 dalam penerimaan devisa negara. ■

(www.mp) foto: Jeyanti/br

Harus Ada *Policy* Pemerintah Tumbuhkan Koperasi

Salah satu pilar ekonomi adalah Koperasi, oleh karena itu harus ada *policy* dari pemerintah agar Koperasi tersebut dapat tumbuh, sebab Koperasi adalah gabungan daripada rakyat, yang anggotanya adalah masyarakat. Demikian hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana, saat memimpin rombongan Kunspek Komisi VI ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Kedatangan Komisi VI DPR RI untuk melihat secara langsung apakah usaha kecil menengah dan koperasi ini tumbuh, sebab salah satu mitra kerja Komisi VI adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau tidak terjadi pertumbuhan, maka kita ingin tahu apa yang

menjadi penyebabnya. Mungkinkah karena kecilnya anggaran Kementerian Koperasi UKM yang hanya senilai 1,1 triliun," ujar Azam di Kendari, Sultra, Selasa (27/9).

Komisi VI akan membahas masalah ini kepada pemerintah, lanjut Azam, dan Komisi VI akan mendorong agar

Kementerian Koperasi dan UKM dapat diberikan anggaran yang cukup, sehingga bisa melakukan pembinaan ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

"Komisi VI minta agar Dekopin dan Kementerian Koperasi dan UKM harus aktif, sebab tangan Kementerian Koperasi sudah tidak sampai ke tingkat Kabupaten, tetapi hanya sampai Provinsi saja. Oleh karena itu di tingkat Kabupaten menjadi lepas dan tidak dalam jangkauan Kementerian Koperasi UKM, kita akan melakukan evaluasi atas hal tersebut," ucap politisi Fraksi Demokrat itu.

Menurutnya, perlu ada pembinaan

Normalisasi Sungai Yasa Perlu Intervensi Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Michael Wattimena mengatakan, terkait penanganan normalisasi Sungai Yasa sebagai alur kapal nelayan Cilacap perlu intervensi Pemerintah Pusat melalui anggaran APBN 2017. Hal tersebut diungkapkannya saat meninjau langsung kondisi Sungai Yasa di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (22/6).

“ Kami melihat secara langsung normalisasi Kali Yasa yang manakala saat pasang surut, alur sungai ini tidak dapat dilalui kapal nelayan dan ini perlu ada intervensi dari Pemerintah Pusat,” ungkap Michael di sela-sela kunjungannya bersama Anggota Komisi V DPR RI lainnya.

Diungkapkan politisi dari Fraksi Demokrat ini, kondisi sungai Yasa atau yang dikenal Kali Yasa oleh warga setempat ini cukup memprihatinkan. Hal ini dikarenakan banyak kapal-kapal nelayan terutama dari Sidakaya dan Sentolo Kawat tidak bisa keluar akibat pendangkalan.

Agar proses normalisasi berjalan dengan lancar, lanjut Michael, diperlukan kerelaan masyarakat untuk melepaskan beberapa bagian tanah depan rumahnya. Sebab, garis sempadan sungai saat ini dipadati hunian warga.



Tim Komisi V juga meninjau pengolahan air bersih PDAM Bendung Gerak Sungai Serayu, Kabupaten Cilacap

Bupati Cilacap Tatto Suwanto Pamuji menyampaikan sejumlah permasalahan yang terjadi di Sungai Yasa antara lain, terjadinya pendangkalan akibat sedimentasi pada dasar Sungai Yasa yang salah satunya diakibatkan oleh pembuangan sampah, kerusakan tebing pada kiri dan kanan, terjadinya banjir apabila hujan dengan intensitas tinggi.

yang bersifat terus menerus di Kementerian Koperasi dan UKM, agar Koperasi ini dapat tumbuh. "Kita juga akan bicarakan kepada Kementerian Koperasi dan UKM, terkait banyaknya Koperasi yang mengalami mati suri atau macet di Provinsi Sulawesi Tenggara, agar koperasi-koperasi yang mati suri itu dapat dihidupkan lagi, diberikan pembinaan atau dan jalan keluar lainnya," pungkasnya. ■

(dep.mp) Foto: Ryan/br

"Kondisi ini akan lebih parah lagi saat kondisi air laut pasang. Kemarin sudah terjadi banjir rob sampai masuk ke kota. Apalagi kalau musim kemarau, ini sudah tidak bisa dilalui, sehingga kapal-kapal dengan kapasitas kurang dari lima gross ton yang berpangkalan di TPI Sidakaya yang mencapai 3.000 unit kesulitan keluar masuk," jelas Tatto Suwanto.

Tatto menambahkan, beberapa rencana kegiatan akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti pengerukan lumpur berkisar antara 15 sampai 17 meter, penguatan tebing sungai dengan tinggi tanggul dibagian muara mencapai 2 meter dan konstruksi tiang pancang dengan panjang 9 meter. "Apabila berjalan dengan baik, diharapkan akan mampu mengurangi bahaya banjir terhadap pemukiman penduduk di sekitar kiri kanan Sungai Yasa serta memperlancar arus lalu lintas kapal nelayan," imbuhnya.

Dalam kunjungan tersebut, Michael juga mendorong normalisasi sungai Yasa agar segera terealisasi melalui pembahasan APBN 2017 bersama Kementerian PUPR. "Komisi V sedang dalam proses pembahasan APBN 2017, mudah-mudahan bisa masuk di program 2017, sehingga apa yang menjadi keinginan Pemerintah Daerah bisa terakomodir," imbuhnya.

Pemerintah setempat mengestimasi normalisasi alur sungai Yasa sepanjang 14 KM setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp70 miliar. Anggaran itu tidak termasuk penanganan anak sungai yang diperkirakan mencapai Rp20 miliar.

Dalam kesempatan kali ini, Tim Komisi V DPR RI juga meninjau pengolahan air bersih PDAM Bendung Gerak Sungai Serayu di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. ■

(ann.mp) Foto: Ann/br



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natarwijana

Komisi VIII Konsultasi dengan BPK Bahas Peningkatan Pelayanan Haji

Komisi VIII DPR RI berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), membahas Hasil Audit Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1436H/2015M. BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Akun Aset Tetap dan Akun Hutang BPIH Terikat.



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher

Ketua Komisi VIII Ali Taher mengatakan bahwa temuan BPK ini akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama. Hal ini sangat penting untuk penyederhanaan penyelenggaraan haji berikutnya.

"Usul saran dan rekomendasi dari BPK menjadi masukan bagi DPR RI dalam rangka upaya perbaikan penyelenggaraan haji pada musim berikutnya," kata Ali Taher, usai rapat tersebut, di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Senin (26/9).

Menurut Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, dari 9 temuan yang didapatkan dari hasil audit BPK, kemudian Komisi VIII meminta saran dan usulan pendapat terutama hal yang terkait menyangkut aset pengelolaan dan penyelenggaraan haji.

Misalnya ditemukan bahwa ada dana yang tersimpan di 17 Bank Penerima Setoran (BPS). BPS ini dari jamaah sebanyak 17 yang tersebar di beberapa bank. Yang paling penting yang diharapkan BPK meskipun sejumlah 17 bank, Komisi VIII minta untuk disederhanakan beberapa bank, tetapi BPK mengatakan sebaran di bank

sesungguhnya tidak masalah.

"Sesungguhnya yang penting adalah rekonsiliasinya dan kecepatan pelaporan keuangan oleh kementerian Agama Dirjen PHU," katanya.

Temuan lainnya adalah manfaat dana yang disimpan itu sebesar Rp3,7 T, yang ternyata dana setoran awal oleh jamaah lebih sedikit dari jasa yang diperoleh. "Ini mestinya bisa mengalokasikan dana untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah mendapatkan fasilitas maksimal. Oleh karena itu kita ingin melihat simpanan Rp8,4T jasanya Rp3,7 yang sebenarnya lebih dari cukup untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji," ungkap Ali

Taher.

Patut diketahui bahwa LPH BPK atas Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1436H/2015M adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Menurut BPK masih terdapat Permasalahan yang menjadi dasar opini WDP.

Diantaranya Aset Tetap, yaitu beberapa permasalahan aset ditingkat Kanwil pada Kemenag Provinsi NTB, Jawa Timur, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Jawa Tengah. Dalam hal informasi keberadaan dan lokasi tanah, gedung, peralatan dan mesin dan aset tetap sebesar Rp515,35 miliar yang belum didukung dengan rincian aset tetap yang memadai.

Selain itu, sebanyak 440 Satker pengelola Aset Tetap belum melakukan inventarisasi dan penyusutan aset tetap.

Serta Aset tetap yang dikelola oleh Kantor Urusan Haji (KUH) di Jeddah belum disajikan dengan harga perolehan atau nilai wajar. Pada setiap awal tahun sebelum tahun 2015, atas aset tetap KUH yang dicatat dalam mata uang asing, dilakukan penyesuaian nilai dengan menggunakan kurs 31 Desember tahun sebelumnya.

Di sisi lain, utang BPIH Terikat, terdapat perbedaan antara data sistem komputerisasi Haji Terpadu dengan data rekening Bank Penerima Setoran (BPS) dan data investasi yang bersumber dari dana setoran awal calon jamaah haji sebesar setoran awal yang terdiri dari Rp179.290.783.736,50 untuk haji reguler, dan Rp677.766.380.065 untuk haji khusus, yang belum dapat dijelaskan. ■

(as) foto: jakarta

Jabar Bisa Jadi Contoh Daerah yang Sukses Tuan Rumah PON dan Peparnas

Jawa Barat bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang sukses sebagai penyelenggara PON dan Peparnas karena didukung aspek, diantaranya banyaknya cabang olahraga yang dipertandingkan, keterlibatan atlet, dan banyaknya panitia yang terlibat.

“Ini saya kira sangat luar biasa,” ujar Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana di sela-sela Kunjungan Spesifik (Kunspek) dalam rangka peninjauan pelaksanaan PON dan Peparnas 2016 di Bandung, Jawa Barat, Selasa (22/9).

"Ini sukses PON terbesar dalam sejarah Indonesia, karena melibatkan 9.229 atlet dan dilayani oleh sekitar 28 ribu relawan dan panitia pelaksana, sehingga

Sekjen DPR RI Terima Mahasiswa Pertiba Pangkalpinang

Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany menerima mahasiswa Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendalami berbagai hal yang berhubungan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya parlemen. Sebagai upaya edukatif, Win sapaan akrab Winantuningtyas menyambut baik kunjungan ini. Di awal pertemuan, Win menjelaskan tiga fungsi MPR, DPR dan DPD sebelum amandemen UUD 1945 maupun sesudah amandemen.

"Kami memberikan wawasan tentang sistem ketatanegaraan, plus kajian-kajian yang sedang berkembang saat ini," papar Win.

Kepada mahasiswa pasca sarjana prodi hukum ketatanegaraan dan pemerintahan tersebut, Win juga memberikan pemaparan singkat tentang Garis-garis Besar Haluan

Negara (GBHN) yang diubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN).

Jika sebelum era reformasi, GBHN ditetapkan oleh MPR. Namun, dengan diamandemennya UUD 1945, terjadi perubahan peran MPR dan Presiden sehingga GBHN tidak berlaku lagi. Sebaliknya, Presiden menyusun RPJMN guna meningkatkan taraf hidup, pemenuhan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat.

"Mereka menyampaikan GBHN perlu dihidupkan kembali, namun jika itu dilakukan berarti fungsi MPR perlu diamandemen lagi kalau begitu. Jadi, sebetulnya

kalau RPJMN bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan sangat bagus. Seperti saat ini Presiden Jokowi menerapkan program nawacita, jadi itu kan betul visi dan misi Presiden terpilih," imbuhnya. ■



Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany

(ann.mp), foto : azka/br.



Anggota Komisi X DPR RI tinjau pelaksanaan PON dan Peparnas 2016

Provinsi Jawa Barat sangat luar biasa," tambahnya.

Namun, lanjut Dadang, tentu ada catatan-catatan dan juga protes-protes dari beberapa kontingen yang harus diperhatikan oleh panitia penyelenggara. Ia menekankan, harus tetap jaga sportifitas di cabang olahraga antara lain berkuda, persoalan di polo air dan juga di cabang-

cabang tertentu ini juga perlu di respon panitia sehingga tidak k e m u d i a n berkembang tak terkendali.

Politisi F-Hanura ini mengapresiasi prestasi atlet PON ke XIX Jawa Barat sudah duduk di peringkat I, "Jawa Barat berjaya ini sekarang sudah nampak hal tersebut dilihat dari jumlah medali sudah diraih Jawa Barat berada di urutan pertama, harapannya tidak kemudian ternodai oleh hal-hal kecil," jelasnya.

Selain itu, "Saya sangat apresiasi Gubernur terhadap penyelenggaraan ini sudah cukup luar biasa. Namun saya mengingatkan hal-hal kecil atau reaksi kecil harus cepat dibenahi, contohnya komplain awak media, karena ternyata mereka tidak

bisa mengakses di tempat-tempat pertandingan dan tidak bisa memfoto karena panitia menyediakan fotografer sendiri sehingga banyak wartawan foto diusir keluar arena pertandingan," tandasnya.

Berbicara soal anggaran, menurutnya Jabar cukup banyak mengeluarkan anggaran. Karena dari alokasi anggaran Rp100 miliar, yang diterima panitia tidak mencapai Rp100 miliar. Pemprov Jabar pun meminta untuk even-even berikutnya agar Komisi X DPR RI memperhatikan bagaimana konsistensi Pemerintah Pusat terhadap pemberian anggaran kepada Pemprov. Jawa Barat sebagai tuan rumah PON, maupun Peparnas.

"Saya sebagai perwakilan Jabar mengapresiasi Jawa Barat sebagai tuan rumah yang sukses, dan mudah-mudahan Komisi X DPR RI bisa menyampaikan ke Pemerintah Pusat terhadap kewajiban anggarannya dan tidak menghambat pencairan," kata politisi asal dapil Jawa Barat itu menambahkan. ■

(rny.mp), foto : rani/br.

DPR RI Minta Potensi UKM di Maluku Dimaksimalkan

Anggota Komisi VI, Fraksi Partai PKS, Adang Daradjatun mengatakan potensi pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) di Provinsi Maluku belum dimaksimalkan. Padahal, potensi di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku.



Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan kerja ke UKM di Provinsi Maluku

Seperti diketahui, Komisi VI DPR RI sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Komisi yang fokus masalah ekonomi, BUMN, Koperasi dan UKM ini akan berdialog dengan sejumlah mitra kerja terkait dan para nasabah binaan PNM, memantau kemajuan dan tantangan pembangunan di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini.

Kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke Maluku ini sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, mengawasi perkembangan dan geliat pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga tantangan dan kendala baik dari segi regulasi dan anggaran bisa diperbaiki. ■

(andri) foto : andri/br.

“Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Tujuan utamanya mendorong pembangunan daerah Maluku melalui mitra kerja komisi VI DPR RI. Mengapa dipilih Maluku? Karena potensi pertumbuhan Maluku cukup besar tetapi kesejahteraan masih dibawah rata-rata nasional sehingga perlu upaya untuk meningkatkan prekonomian masyarakat Maluku secara merata,” kata Adang selaku ketua rombongan kunjungan kerja saat meninjau usaha kecil menengah (UKM) dan Pemodal Nasional Madani (PNM) sebagai unit layanan modal mikro, di Ambon, Selasa (27/9).

Menurutnya, untuk menggali dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pembangunan di Maluku tersebut momentumnya cukup tepat dengan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan poros maritim dan ekonomi kreatif. Apalagi, Provinsi

Maluku sendiri merupakan provinsi kepulauan.

Ia mengatakan potensi pertumbuhan di Maluku berada di sektor perikanan. Tetapi saat ini, katanya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pendorong pertumbuhan masih dominan sektor konsumsi dan yang kedua baru perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor perikanan dan ekonomi kreatif bisa menjadi pendorong pertumbuhan Maluku.

“Yang tadi dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh konsumsi rumah tangga, dan ekspor. Dari sisi penawaran didorong oleh perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor ekonomi kreatif dan perikanan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan masyarakat Maluku. Oleh karena itu dalam pertemuan ini, kita mendorong kearah industri ekonomi kreatif dan perikanan,” katanya.

Komisi III Dukung Sikap Tegak Kejagung Eksekusi Pidana Mati

Komisi III DPR RI mendukung dan mengapresiasi ketegasan Kejaksaan Agung, selaku eksekutor dalam pelaksanaan perkara pidana mati yang sudah memiliki keputusan tetap. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III Arsul Sani saat rapat kerja dengan Jaksa Agung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).

Baleg Terima Keluhan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI RI beraudiensi dengan Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) terkait Undang-Undang No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Dikdok) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/09).

“ Kepada Baleg, PDUI menyuarakan penolakannya terhadap program studi Dokter Layanan Primer (DLP) yang diamanatkan dalam UU Dikdok. Menurutnya, program pendidikan DLP tidak layak dipertahankan di dalam UU Dikdok.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyarankan agar Kemenristekdikti dan Kemenkes untuk menunda pelaksanaan DLP. Menurutnya, jika ini diteruskan maka akan berdampak terhadap pelayanan kesehatan di masyarakat.

"Ini bisa berbahaya bagi sistem pelayanan kita kalau kemudian suatu saat



Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas

mereka melakukan gerakan penolakan secara besar," kata politisi dari Fraksi Gerindra itu.

Disamping itu, program DLP dinilai

akan mengurangi jumlah tenaga medis, terutama di wilayah Indonesia bagian Timur. "Nanti kalau semua dokter umum melanjutkan pendidikan DLP yang bukan spesialis, yang melayani masyarakat siapa? Nah ini harus diatur lebih jauh sebelum pemerintah menjalankan DLP," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, hanya ada 5 universitas yang tersebar di Pulau Jawa yang menyatakan kesiapannya untuk membuka program studi DLP ini. Untuk itu, PDUI meminta dilakukannya *legislative review*

secara komprehensif dan menyeluruh terhadap UU Dikdok terutama dalam pengaturan terkait dokter umum/primer dan uji kompetensi dokter. ■

(ann.mp) foto: arif/br.

“ Setiap akan dilaksanakan eksekusi hukuman mati, selalu menarik perhatian dari berbagai kalangan. Baik dari kalangan dalam negeri maupun kalangan dunia internasional. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa eksekusi hukuman mati itu harus selalu dilakukan bersama-sama atau beramai-ramai, dan dipusatkan disatu tempat yakni di Nusakambangan, padahal terpidana matinya tidak semua ada disana," ujar Arsul Sani.

Hal ini menimbulkan kesan terjadi festivalisasi, lanjutnya, yang membuat perhatian dalam bentuk kecaman atau permintaan penundaan eksekusi itu semakin besar.

RAPBN 2016 memberikan anggaran pelaksanaan eksekusi mati untuk sekitar 12 atau 14 orang, namun terakhir yang baru dilaksanakan hanya terhadap 4 orang saja. Tentu hal ini juga menimbulkan

persoalan tersendiri, paling tidak dari sisi anggaran.

"Bila ingin dilaksanakan lagi secara rombongan, apakah anggarannya sudah cukup atau mungkin juga terjadi moratorium hukuman mati, karena anggarannya dipotong?," tanya Arsul. Selain itu ia juga mempertanyakan, dalam masalah penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung apakah sudah terjadi efisiensi bila dikaitkan dengan penyelamatan keuangan negara.

"Kejaksaan Agung harus melakukan fungsi mitigasi, terhadap potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, yakni antara fungsi pencegahan dan fungsi penindakan," pungkasnya. ■

(dqp.mp), foto: Krenad/br.



Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Pemerintah Harus Buat Terobosan Hadapi MEA

Semenjak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya para pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) harus terus didorong agar bisa berdaya saing yang tinggi dan dapat memenuhi standar-standar tertentu (SNI).

“Jadi bagaimana peran Pemerintah ini melakukan terobosan untuk menembus pasar-pasar baru sehingga produksi lokal ini yang mempunyai nilai seni luar biasa masuk ke pasar yang lebih luas,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi (Partai Hanura) kepada Parlemen terdahulu baru-baru ini.

Dia meminta Pemerintah agar bisa menjual nilai karya seni dan hasil buah kerajinan tangan masyarakat Indonesia. Farid juga mendorong agar ada ide untuk mempromosikan produk-produk lokal ke kancah Internasional.

Menurut politisi Partai Hanura, selama ini kendala pelaku usaha dalam melakukan ekspor melalui daerah lain terletak pada kepercayaan *buyer* yang rendah pada daerah NTB. Hal ini membuat pelaku usaha NTB jarang



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi

melakukan *direct selling* untuk ekspor atas nama NTB.

Persoalan tersebut, lanjutnya, karena NTB tidak terkenal seperti Bali yang mudah mendapat perhatian dan kepercayaan dari pihak asing. Namun seiring dengan berkembangnya pariwisata NTB tentu pihak asing secara tidak langsung akan mulai membuka

peluang untuk bisnis kreatif NTB.

"Ini yang akan kita *design* bersama nanti dengan kementerian perindustrian dan perdagangan di Komisi VI DPR RI RI, agar IKM juga memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni dan memiliki kelengkapan administrasi sebagai pelaku usaha untuk meminimalisir

kendala-kendala dikemudian hari," jelasnya.

Politisi asal Dapil Jawa Timur XI menghimbau Pemerintah Daerah, Provinsi maupun pusat agar dapat melakukan terobosan guna menembus pasar baru yang lebih luas sehingga IKM di Provinsi NTB dapat bersaing serta meningkatkan ekonomi masyarakat. ■

(iv), foto: Iwan/bbr

DPR RI Minta Bencana di Garut dan Sumedang Ditangani Serius

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI RI Iskan Qolba Lubis berharap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Kabupaten Garut dan Sumedang, dapat ditangani secara serius. Sebab, hingga Kamis (22/9), jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 26 orang, hilang 18 orang, dan luka-luka sebanyak 433 orang.

Oleh karena itu, Iskan meminta lembaga-lembaga tanggap darurat seperti Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan BPBD, juga TNI/Polri dapat berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat.

"Pemerintah Provinsi harus memastikan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) berkordinasi untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan segera kepada korban," jelas Iskan di Jakarta, Jumat (23/9).

Bertambahnya jumlah korban meninggal, menurut Iskan mengindikasikan perlunya terus dilakukan pencarian korban yang belum ditemukan.

"Perlu terus diintensifkan dalam mencari korban baik yang masih hidup maupun yang sudah tewas, karena berdasarkan laporan banjir dan longsor yang terjadi di kedua kabupaten itu termasuk besar," jelas Legislator PKS ini.

Sementara terkait dana bantuan bencana, Iskan berharap prosesnya tidak dipersulit dalam hal pencairan. Sehingga,



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI RI Iskan Qolba Lubis

hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.

Iskan menambahkan, Komisi VIII dan Pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan, dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar. "Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda mampu jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana, sehingga bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Selain itu, perlu juga segera dikordinasikan penyaluran dana bantuan yang datang dari masyarakat," kata Iskan.

Sedikitnya, menurut Koordinator Humas dan Protokoler BASARNAS Provinsi Jawa Barat, Joshua Banjarnahor, terdapat 26 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor, dimana 18 di antaranya perempuan dan 8 (delapan) laki-laki.

Banjir bandang dan longsor dipicu hujan intensitas tinggi sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat. Saat ini sebagian banjir sudah surut. Meskipun demikian, menurut BNPB, bencana ini menunjukkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis. ■

(as) foto: Kresna/br

Kunjungi Lombok Tengah, Komisi V Soroti Pemeliharaan Embung

Komisi V DPR RI mengunjungi Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat, (23/9) guna memantau percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis mengatakan akan terus melakukan pemantauan terkait Embung yang ada di NTB.

“Komisi V melakukan Kunspek ke Lombok Tengah untuk melihat hal berkaitan dengan fungsi pengawasan. Karena Lombok Tengah ini cukup banyak bendungan, ada sembilan bendungan di NTB. Dari sembilan bendungan tersebut kita terus lakukan pemantauan agar dapat manfaat,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Bupati Lombok Tengah.

Politisi Gerindra ini juga menyampaikan agar Ditjen Sumber Daya Air untuk dapat memanfaatkan Embung yang ada dan dapat dipelihara dengan baik. "Jika lihat embung itu dapat dimanfaatkan dan dipelihara," tegasnya.

Ia pun menegaskan agar pihak terkait melakukan koordinasi



Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis

terhadap hal-hal yang masih kurang dan perlu diperhatikan oleh DPR RI. "Kita minta jika ada embung yang perlu dilakukan perbaikan dan kurang, mohon untuk disampaikan," ujarnya. Misalnya, Komisi V menemukan

luas embung yang kian berkurang, sehingga butuh perhatian pemerintah pusat.

"Karena tadi lihat satu embung itu sebelum dibangun kurang lebih 300 hektar, tapi sekarang hanya mampu melayani 70 hektar," paparnya.

Politisi Dapil NTT ini meminta agar Dirjen SDA dapat melakukan audit terhadap embung dan melakukan fungsi pengawasan juga. "Kita minta supaya dari Dirjen SDA dapat melakukan audit terhadap embung dan melakukan fungsi pemeliharaan," pungkasnya. ■

(as) foto: benedra/br

Komisi X Apresiasi Transparansi Penggunaan Anggaran PON XIX

PON ke XIX 2016 adalah *event* yang sangat besar sehingga pengeluaran dan penggunaan dana harus sukses administrasi. Artinya dalam pengeluaran dan penggunaan anggaran dikawal oleh tim pengawasan yang transparan.

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi X Sutan Adil Hendra ketika melakukan kunjungan spesifik ke Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/9) diterima Gubernur dan Pengurus Besar PON serta meninjau pelaksanaan PON XIX. Dalam acara yang dipimpin Achmad Fikri Faqih, Sutan mengapresiasi sikap Gubernur Jabar soal penggunaan anggaran PON.

" Pak Gubernur wanti-wanti bahwa jangan memakai nama saya. Ini menunjukkan sikap tegas dan kehati-hatian," tegas politikus Gerindra Dapil Jambi.

Pada pertemuan itu Tim Komisi X mengharapkan dengan terselenggaranya PON ke XIX di Jawa Barat bisa sukses



Pimpinan Komisi X DPR RI menerima Cendera Mata dari Gubernur Jabar simbol PON XIX di Bandung

administrasi dan prestasi." Jawa Barat dalam segi prestasinya bisa lebih sukses, saya rasa wajar karena sudah lama berlatih dan sebagai tuan rumah mempunyai supporter dan pendukung yang ada keterkaitan batin untuk memperjuangkan dan memberi spirit terhadap atletnya," jelasnya.

Tim Komisi X DPR RI beserta rombongan berkesempatan meninjau secara langsung *venue-venue* cabang olah raga pertandingan PON ke XIX 2016 diantaranya cabang whusu di kawasan GOR Pajajaran, bola voli, polo Air, Panah di Komplek stadion Si Jalak Harupat. ■

Lebih lanjut Komisi X DPR RI berharap, event ini menjadi sesuatu ajang persiapan pekan olah raga Sea Games yang akan berlangsung tahun ini dan Asean Games 2018. Kepada para atlet DPR RI menyampaikan pesan khusus untuk bertanding secara sportif dan disiplin. Kalah menang adalah lumrah, sedangkan sportif itu menjadi tolak ukur dalam sebuah pertandingan untuk meraih prestasi.

(rni.mph) foto: Rumi/br



Suasana diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU Pemilu

13 Isu RUU Pemilu Masih Krusial

RUU Pemilu yang kini sedang dirumuskan di DPR RI, masih menyimpan 13 isu krusial. Diantara isu penting itu adalah sistem pemilu, sengketa partai politik, pembagian suara, dan *presidential threshold*.

Demikian mengemukakan dalam diskusi Forum Legislasi yang membincang RUU Pemilu, Selasa (27/9) di Media Center DPR RI RI, Senayan, Jakarta. Hadir sebagai pembicara Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi (F-PPP), Chusnul Mar'iyah (pengamat politik), dan Margarito Kamis (pengamat hukum).

Komisi VI DPR RI Dorong Pelatihan SDM Terkait Pengolahan Timah di Babel

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar Meminta Pemerintah Pusat dapat lebih memperhatikan Kemampuan Sumber Daya Manusia Provinsi Bangka Belitung dalam mengolah hasil Pertambangan Timah, sekaligus juga dapat memiliki Keahlian di bidang lain, salah satunya Usaha Kecil dan Menengah.

Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rombongan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Ke Provinsi Bangka Belitung, Kamis (22/9). Kunjungan tersebut diikuti pula oleh anggota Komisi VI DPR RI RI Zulfan Lindan, Ihsan Yunus, Eriko Sotarduga, Darmadi Durianto, Endang Srikarti Handayani, Sartono Hutomo, Andriyanto Johan Syah, Kholilurrahman, Mukhlisin, dan Matri Agoeng.

"Kita berharap kepada pemerintah provinsi Babel bahwa dengan potensinya yang cukup baik dalam SDA, tentunya bisa menggali dalam hal melakukan ekonomi kreatif berbentuk IKM, dimana ada beberapa potensi-potensi yang sifatnya dapat dijadikan kerajinan oleh masyarakat Babel kerajinan logam," jelas Nasril.

Sementara itu, menurut anggota Komisi VI DPR RI Zulfan Lindan mengatakan, IKM di Provinsi Bangka Belitung belum bisa dijadikan andalan, mengingat dulu semua masyarakat di Bangka Belitung lebih banyak beraktifitas disektor informal dan disaat ketersediaan



Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar

timah sudah menipis maka masyarakat berbondong-bondong mencari alternatif lain untuk mata pencaharian mereka.

Untuk itu, Zulfan berharap, IKM yang sudah berjalan saat ini bisa terus berkembang dan terus berinovasi. Selain itu, dirinya meminta Pemprov Babel dapat mendorong masyarakatnya untuk tetap mencari alternatif lain, salah satunya dari sektor kekayaan budaya lokal.

"Nah ini tentu kan kita cari alternatif lain lagi, apa kekayaan-kekayaan budaya lokal yang ada di Bangka, apakah Tenun ataupun alat-alat kebutuhan rumah tangga

dan lain-lain, itu harus dikembangkan dan harus dicari untuk menjadi sebuah potensi yang riil, dan bisa digunakan oleh masyarakat dan bisa menjadi sebuah aktivitas ekonomi. Itu yang kita perlukan," tambahnya

Perlu diketahui, Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI terkait IKM Binaan Kementerian Perindustrian telah mengunjungi IKM Olahan hasil Ikan Laut, IKM hasil Olahan Timah, dan IKM Batik Songket Tenun Cual.

Sebelumnya dalam pertemuan, dengan Sekda Prov. Babel dan jajaran, Komisi VI mendapatkan pemaparan terkait Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bangka Belitung, KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Perkembangan IKM di Provinsi Bangka Belitung.

Menurut Nasril Bahar, dari paparan Sekda Provinsi Bangka Belitung terdapat potensi yang cukup besar dalam mengelola hasil pertambangan timah dan IKM di Provinsi Bangka Belitung. Dijelaskan oleh Nasril Bahar, bahwasanya sejak zaman Belanda, Bangka Belitung memang sudah

terkenal sebagai daerah pertambangan Timah, namun menurut penelitian Direktur Timah beberapa waktu lalu dijelaskan bahwa Deposit Timah sudah sangat menipis dan otomatis dengan menipisnya ketersediaan Timah di Bangka Belitung maka jumlah pekerja pun akan semakin berkurang, ditambah Timah masih menjadi mata pencaharian utama untuk

hidup masyarakat Bangka Belitung. ■

Disampaikan Baidowi, perdebatan menyangkut sistem pemilu sangat alot terjadi. Pada dua pemilu sebelumnya, selalu menggunakan proporsional terbuka. Diungkapkan Baidowi, ada sekitar 500 pasal yang sedang dirumuskan. Dan persoalan krusial lainnya menyangkut *parliamentary threshold* yang diwacanakan antara 3,5 persen hingga 7 persen. Penyelenggaraan Pemilu dan keterwakilan perempuan juga jadi topik hangat pembahasan RUU ini. Pembahasan kali ini dirasa berat, karena pada 2019 akan terjadi Pemilu massal, dari pemilihan legislator, pilkada, hingga pemilihan capres.

Pengamat politik dari UI Chusnul Mar'iyah menyatakan, pada Pilkada serentak kelak isu-isu lokal tereduksi.

Kerawanan sosial dan kecurangan yang mungkin masih terjadi, menuntut KPU juga harus betul-betul mengamankan suara rakyat. Pada Pemilu 2004 sebetulnya IT KPU sudah luar biasa baik. Tinggal meneruskan saja sistem teknologi yang pernah diterapkan. Apalagi, pada 2019 semua pemilihan serentak dilakukan.

Chusnul menambahkan, sistem E-Voting yang coba diwacanakan untuk diterapkan, justru akan mengancam demokrasi. "Demokrasi Indonesia sudah luar biasa dengan melakukan penghitungan langsung di TPS," ujarnya. Persoalan krusial lain, lanjut Chusnul, adalah DPT. Ini bisa jadi sumber manipulasi yang dilakukan penyelenggara Pemilu.

Sementara Margarito Kamis, menyampaikan bahwa Pemilu serentak pada 2019 nanti akan menyulitkan teknis penghitungan suara, baik untuk pilkada, pileg, maupun capres. Dia juga memprediksi, Pilpres nanti akan dilakukan dua putaran. Dengan kondisi faktual politik terkini, agak sulit capres meraih suara terbanyak dalam satu putaran. ■

(cs), foto: rani/bkr

(mal), foto: nasylu/bkr

Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Kementerian Kesehatan menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sebanyak 519 DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan yang disepakati antara DPR RI dan pemerintah di Gedung DPR RI RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/9).

Wakil Ketua Baleg Firman Soebangyo menjelaskan, 519 DIM RUU Kekarantinaan Kesehatan dikelompokkan sebagai berikut, 355 DIM yang bersifat tetap, penyempurnaan substansi 86 DIM, perubahan redaksional 66 DIM, penambahan substansi baru 30 DIM, dan 4 DIM yang akan dihapus.

"Dari jumlah DIM yang ada, kita bersepakat bahwa DIM yang bersifat tetap akan disetujui pada rapat ini, karena ada kesamaan pandangan. Sementara untuk DIM yang mengalami penyempurnaan substansi, perubahan redaksional maupun DIM yang akan dihapus akan



Wakil Ketua Baleg Firman Soebangyo berbincang dengan Menteri Kesehatan Nila Djurwita F. Moeloek

dilakukan pembahasan secara mendalam di tingkat Panja," ungkap politisi dari Fraksi Golkar itu.

Sementara itu, Menteri Kesehatan

Nila Farid Moeloek mengatakan banyak kesamaan pandangan antara pemerintah dan DPR RI terkait dengan pembahasan DIM RUU usulan pemerintah tersebut, sehingga diharapkan RUU ini segera disahkan untuk meningkatkan ketahanan nasional dari ancaman penyakit.

Baleg akan membentuk Panja RUU Kekarantinaan Kesehatan yang diketuai oleh Wakil Ketua Baleg Dossy Iskandar Prasetyo (F-Hanura). Selanjutnya, Panja RUU Kekarantinaan Kesehatan akan melakukan pendalaman DIM bersama pemerintah terkait DIM yang mengalami penyempurnaan substansi. ■

(amm.mp), foto: gji.br.

Komisi VI Dorong Potensi Usaha Kain Tenun Sultra

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah berharap kedatangan para anggota Dewan ke Sulawesi Tenggara dapat menjadi motivasi bersama, baik bagi pelaku usaha kecil, Koperasi, maupun para Birokrat, agar terus mendorong, mendampingi, dan mengawal program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu perlu dilakukan melalui program yang masif sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti UKM masyarakat Sultra yang mengangkat potensi kain tenun.

“Kain tenun di Sulawesi Tenggara merupakan hal yang bagus dan perlu kita dorong agar eksistensinya menjadi lebih baik, supaya dapat benar-benar berdaya dan mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan yang ada di Provinsi ini,” ucap Siti Mukaromah di Kendari, Sultra, Selasa (27/9).

Siti menyatakan, Komisi VI telah melihat realita di lapangan yang berkaitan dengan masalah Koperasi dan UKM. Koperasi dengan beberapa aktifitasnya, baik Koperasi simpan pinjam maupun Koperasi untuk bantuan usaha kecil menengah.

Pada kunspek tersebut, Komisi VI mendapatkan informasi bahwa ada

beberapa Koperasi yang telah mendapatkan bantuan pinjaman LPDB, dan mereka juga dapat mengakses masalah KUR dan lain sebagainya.

"Sepanjang Koperasi itu sehat dan bagus, maka secara prosedur dapat melakukan akses terhadap adanya LPDB tersebut. Dari paparan yang kita dapat, keberadaan beberapa Koperasi itu cukup sehat setelah mereka mendapat bantuan pinjaman dari LPDB," jelasnya.

Menurutnya, hal itu perlu didukung agar yang mendapatkan kesempatan bukan hanya satu atau dua Koperasi, melainkan banyak Koperasi dan usaha kecil menengah lainnya yang ada di negara kita. ■



Tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI saat mengunjungi koperasi kain tenun di Sulawesi Utara

(dep.mp) foto: Devibr



Tim kunjungan spesifik Komisi VI DPR RI saat meninjau IKM Ragenda Mop Muharar Produk Perhiasan di Kota Mataram

Komisi VI Apresiasi IKM Produk Perhiasan Di Mataram, NTB

Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Indonesia telah mendapat perhatian serius, baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas. Terutama karena kelompok usaha tersebut telah membuka banyak lapangan kerja dan menjadi salah satu sumber penting bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

“ Ini adalah wujud nyata. Ternyata tempat ini dulu dimulai kerja tangan satu orang dan sekarang sudah ada 12 orang yang bekerja di bengkelnya, belum lagi yang ada budidaya di laut,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal kepada Parle disela-sela saat meninjau IKM Ragenda Mop Muharar Produk Perhiasan di Kota Mataram, Jum'at (23/9).

Menurut politisi Partai Gerindra, ini wujud nyata bahkan alat-alat kerja yang DPR RI anggarkan sampai kepada pengusahanya dengan kisaran dana kurang lebih Rp250,- juta. Pengusahanya sendiri merasa bermimpi karena tidak termungkinkan mempunyai alat-alat itu,

Hekal mengatakan, besarnya peran IKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya selalu diberikan dukungan oleh pemerintah, baik berupa pelatihan, fasilitas maupun pendampingan sehingga hasil produksinya lebih berkualitas dapat bersaing.

Tetapi kerajinan tangan perak dan mutiara karya anak bangsa yang indah dan sangat luar biasa, dalam hitungan bulan bisa ditiru oleh negeri tirai bambu dengan bahan dari plastik. “Inilah yang mengkhawatirkan, kerajinan tangan karya anak bangsa ini disaingi dengan produk-produk murah yang banjir dari impor khususnya dari negeri tirai bambu,” keluhnya.

Untuk itu, Pimpinan Komisi VI yang membidangi industri dan perdagangan ini meminta para pengusaha harus jual mutu dan seni. Apalagi pengusaha kita belum mampu untuk bersaing dengan produk-produk yang super murah.

“Jadi intinya kita harus dorong supaya mereka bisa berkarya dan kita fokuskan selain mereka mendapatkan kebutuhan alat dan

training yang diperlukan, yang paling penting adalah kunci pemasarannya itu,” jelasnya dengan menambahkan, kalau kita tidak bisa berkompetisi di segmen yang murah maka harus berkompetisi di segmen barang yang bagus.

Ia berharap pengusaha yang sudah dibina jangan sampai nanti jatuh lagi, karena mereka sudah bisa menciptakan produk-produk baru dan pihaknya mendorong kepada BUMN-BUMN melalui program bina lingkungannya bisa menyediakan tempat khusus kepada pengrajin-pengrajin tradisional.

Begitu pula dengan perbankan, mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara sekaligus menjembatani kebutuhan modal antara pemilik dana dan peminjam dana termasuk pengusaha IKM.

Sementara Direktur Kementerian Perindustrian, Sudarto mengapresiasi kunspek Komisi VI selain memonitor juga mempromosikan produk dan mendorong produk IKM khususnya kerajinan dari kerang. Ia memberi contoh, salah satu anggota Komisi VI sudah mencanangkan satu jenis produk yang berlogo DPR RI dari Kerang.

“DPR RI saja sudah ada satu promosi, kalau setiap *design* produk itu dipahami dan ada peluang marketnya, itu saya kira akan berkembang terus,” ujar Sunarto.

Ke depan, lanjutnya, kita merencanakan program-program yang untuk pengembangan produk dengan istilah *new product*, *new design* dan *new market*, baik nasional maupun internasional. Maka produk yang diunggulkan dari kerajinan Kerang yang aman dari lingkungan itu akan menjadi suatu produk-produk yang layak untuk dipamerkan di bandara, hotel dan tempat strategis lainnya. ■

(foto) foto: iwan armaniasfu

JENDELA PARLEMEN

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344
@dpr_ri DPR RI @DPR_RI DPR RI



Tim kunjungan spesifik Komisi VI DPR RI berdialog dengan Pengusaha Mikro Kecil & Menengah Binaan PT. PNM Maluku. Rabu (28/9), Foto : Andri

Tim kunjungan kerja Komisi VI DPR RI saat mengunjungi pengusaha kain tenun di Sulawesi Utara. Selasa (27/9), Foto : Ryan



Sekretariat Jenderal DPR RI melepas lima pegawai yang telah memasuki masa Purna Bakti (Pensiun) pada tahun 2016, Rabu(28/9), Foto : Arief

